



Bahan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

pada Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI

Jakarta | 13 Januari 2022





DAFTAR ISI

01	Rencana Penetapan Wilayah Pertambangan di 10 Provinsi	3
02	Program KESDM Tahun 2022 yang terkait dengan Aspirasi Masyarakat dan Evaluasi Kinerja KESDM Tahun 2021	14
03	Kebijakan Pemenuhan DMO Batubara	24
04	Penjelasan Terkait Pencabutan Izin Perusahaan-Perusahaan Tambang Centre For Energy and Mining Law Studies	30



Rencana Penetapan Wilayah Pertambangan di 10 Provinsi



PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN



DASAR HUKUM

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

- Wilayah Pertambangan (WP) menjadi landasan penetapan kegiatan usaha pertambangan.
- WP ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 15 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan:

- WP dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun.
- bupati/walikota Gubernur atau dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

URGENSI PERUBAHAN

- Perubahan WP terakhir pada tahun 2017 (WP tahun 2017) dan tahun 2022 dimungkinkan untuk dilakukan perubahan.
- Gubernur dan Bupati terkait telah mengusulkan perubahan atas WP tahun 2017 karena tidak sesuai lagi dengan dinamika kegiatan pertambangan di daerah.
- Diusulkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di dalam WP untuk dapat diberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk penanganan Penambangan Tanpa Izin (PETI).
- Perlu penetapan WP sebagai bentuk kepastian hukum pada wilayah yang terdapat perubahan peruntukan lahan dan perubahan beberapa wilayah izin eksisting.

TUJUAN

Pemberian kepastian hukum untuk usaha pertambangan, termasuk pertambangan rakyat yang telah sesuai dengan dinamika kegiatan pertambangan dan Tata Ruang Daerah.

Kriteria Penetapan Wilayah Pertambangan (Pasal 2 PP No. 22 Tahun 2010)



Adanya Indikasi Formasi Batuan Pembawa Mineral dan/atau Pembawa Batubara

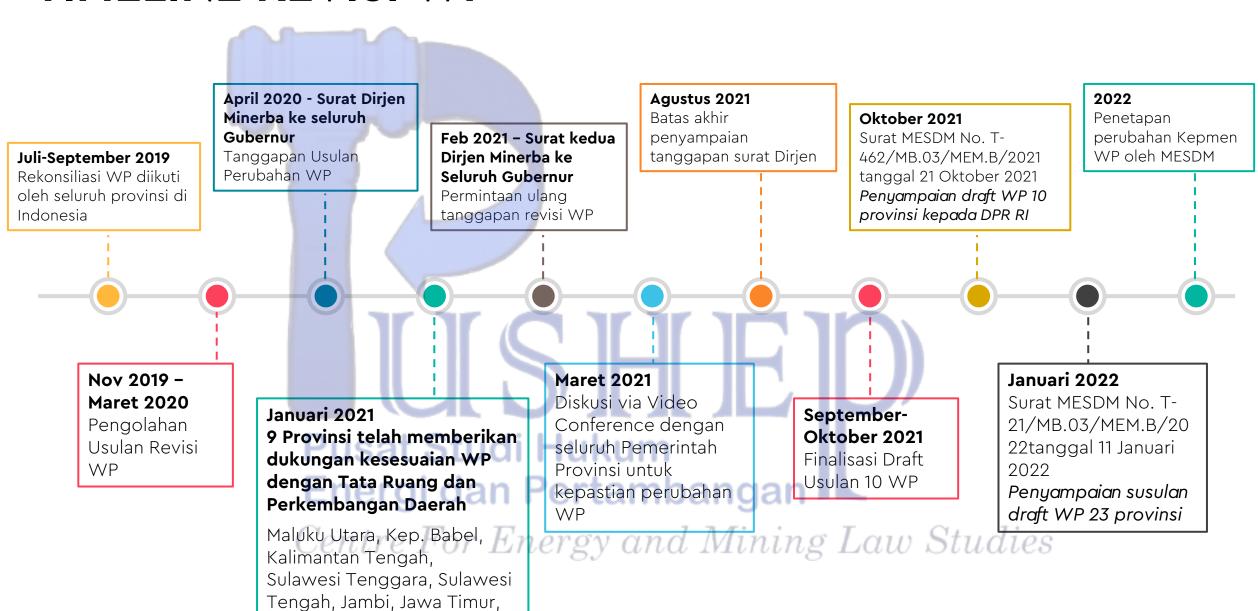


Adanya Potensi Sumber Daya Bahan Tambang Yang Berwujud Padat Dan/Atau Cair

TIMELINE REVISI WP

NTB, Gorontalo





DAFTAR PENYAMPAIAN USULAN PERUBAHAN WP



Provinsi	Usulan Perubahan	Rekom WPR	Pengajuan Konsultasi DPR
Aceh	✓	√	√ **)
Sumatera Utara	✓	✓	√ **)
Sumatera Barat	\checkmark	/	√ **)
Riau *)	\checkmark	✓	V
Kepulauan Riau *)	\checkmark	✓	V
Jambi	✓	/	/ **)
Sumatera Selatan	✓	✓	√ **)
Bengkulu	✓	✓	√ **)
Lampung	✓	7/7	√ **)
Kep. Bangka Belitung*)	✓	✓	✓
DKI Jakarta			
Jawa Barat *)	✓	V	✓/
Jawa Tengah	√Pııı	eat Sti	/**)
D.I. Yogyakarta *)	√		Juki
Jawa Timur	√En(ergi da	√ **)
Banten	Your	tro Tor	√ **)
Bali	- Den	116 T.01	

Provinsi	Usulan Perubahan	Rekom WPR	Pengajuan Konsultasi DPR
Nusa Tenggara Barat *)	✓	√	✓
Nusa Tenggara Timur	✓	✓	√**)
Kalimantan Barat *)	✓	✓	✓
Kalimantan Tengah	✓	✓	√ **)
Kalimantan Selatan	✓	✓	√ **)
Kalimantan Timur	✓	✓	√ **)
Kalimantan Utara	✓	✓	√ **)
Sulawesi Utara	✓	✓	√ **)
Sulawesi Tengah *)	✓	✓	✓
Sulawesi Selatan	✓	✓	√ **)
Sulawesi Tenggara	√	✓	√ **)
Gorontalo *)	√	✓	✓
Sulawesi Barat	✓	✓	√ **)
Maluku	✓	✓	√ **)
Maluku Utara *)	✓	✓	✓
Papua	✓-	J:	√ **)
Papua Barat	$iw \Rightarrow iw$	iles,	√**)

^{*)} Draft Kepmen Revisi WP 10 Provinsi yang telah disampaikan ke Komisi VII DPR RI melalui surat No. T-462/MB.03/MEM.B/2021 tanggal 21 Oktober 2021

^{**)} Draft Kepmen Revisi WP 23 Provinsi yang Telah Melengkapi Persyaratan dan Penentuan WP melalui surat MESDM No. T-21/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 11 Januari 2022

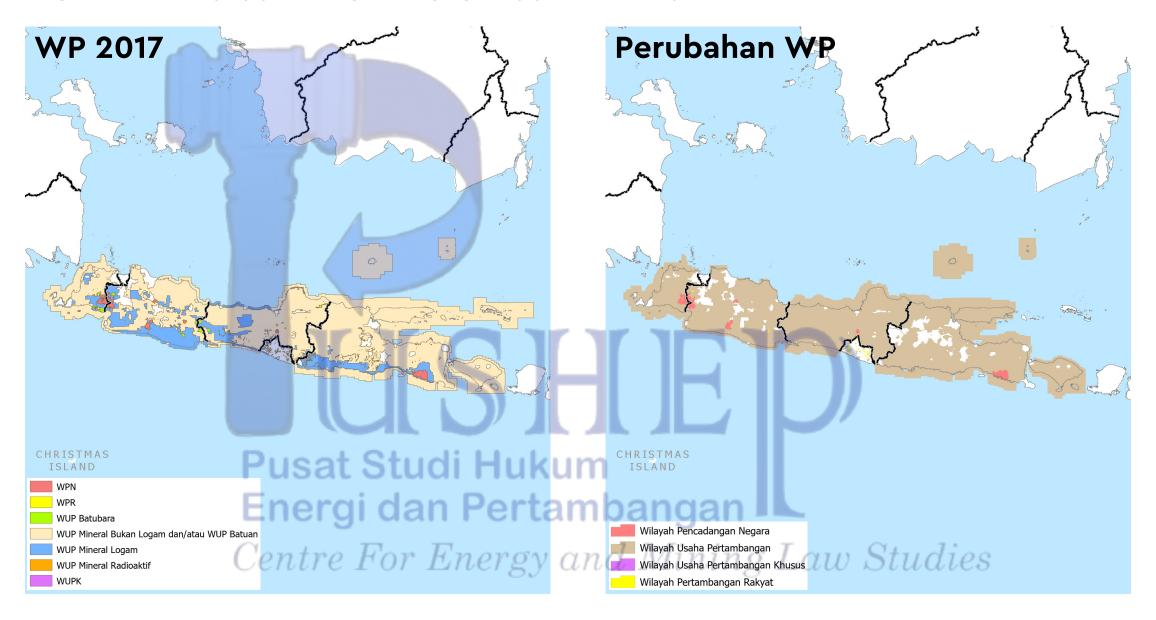
PERUBAHAN WP PULAU SUMATERA





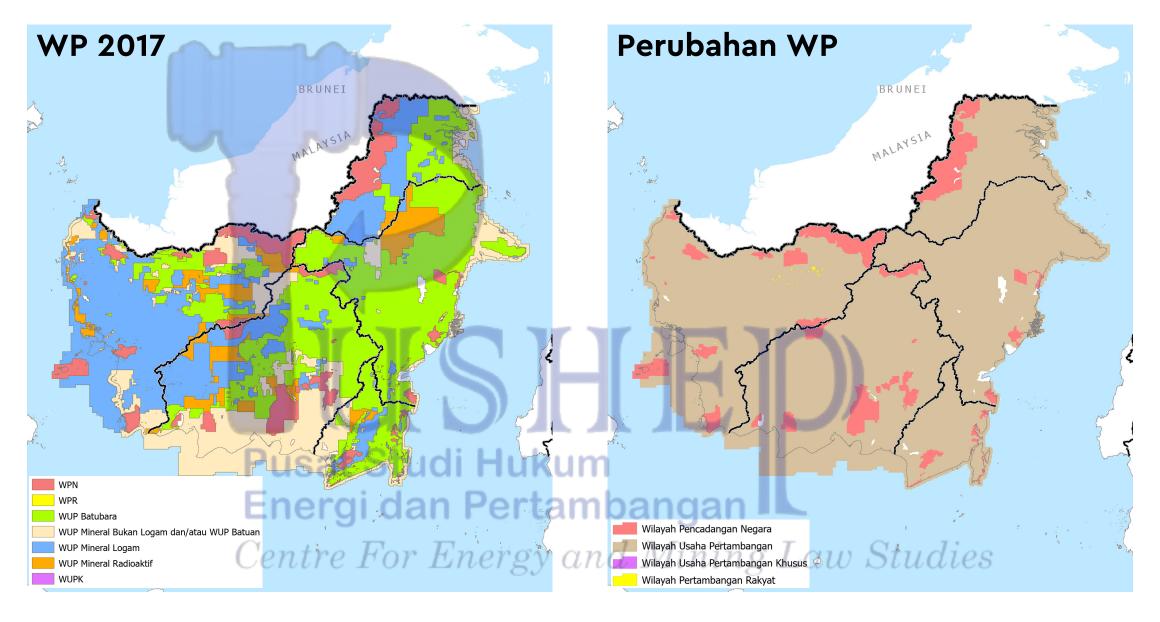
PERUBAHAN WP PULAU JAWA DAN BALI





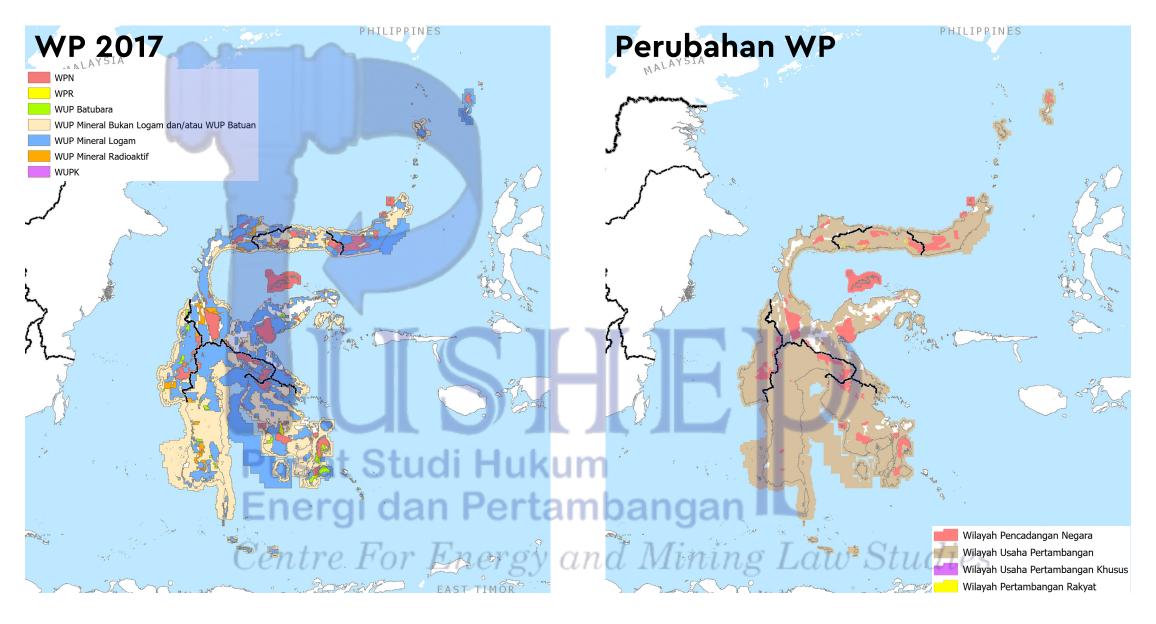
PERUBAHAN WP PULAU KALIMANTAN





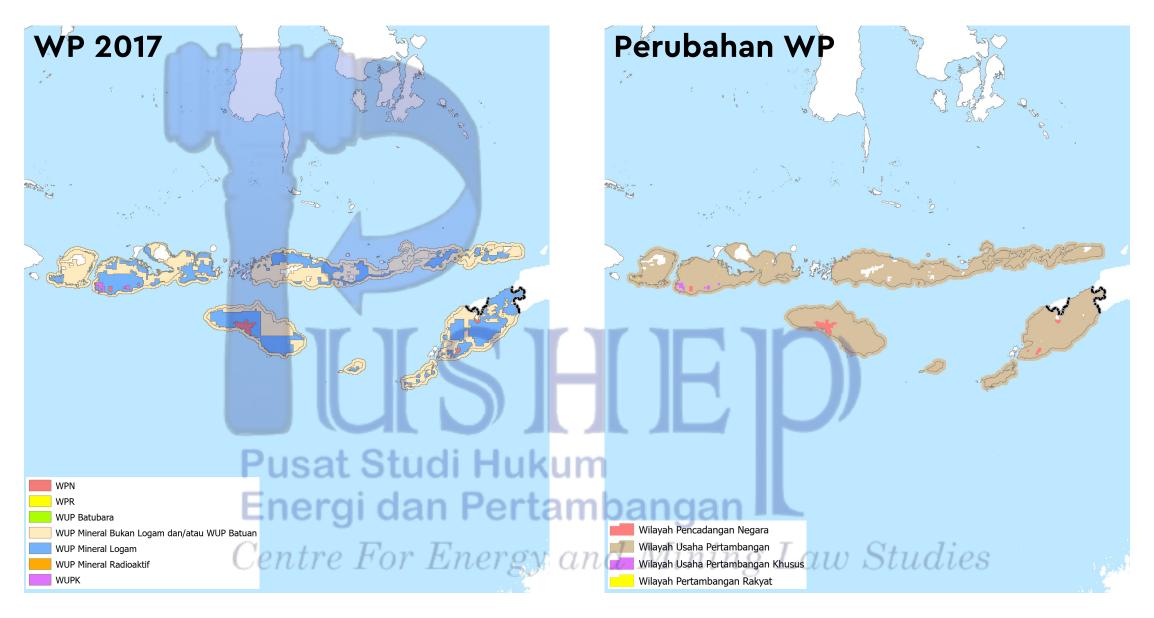
PERUBAHAN WP PULAU SULAWESI





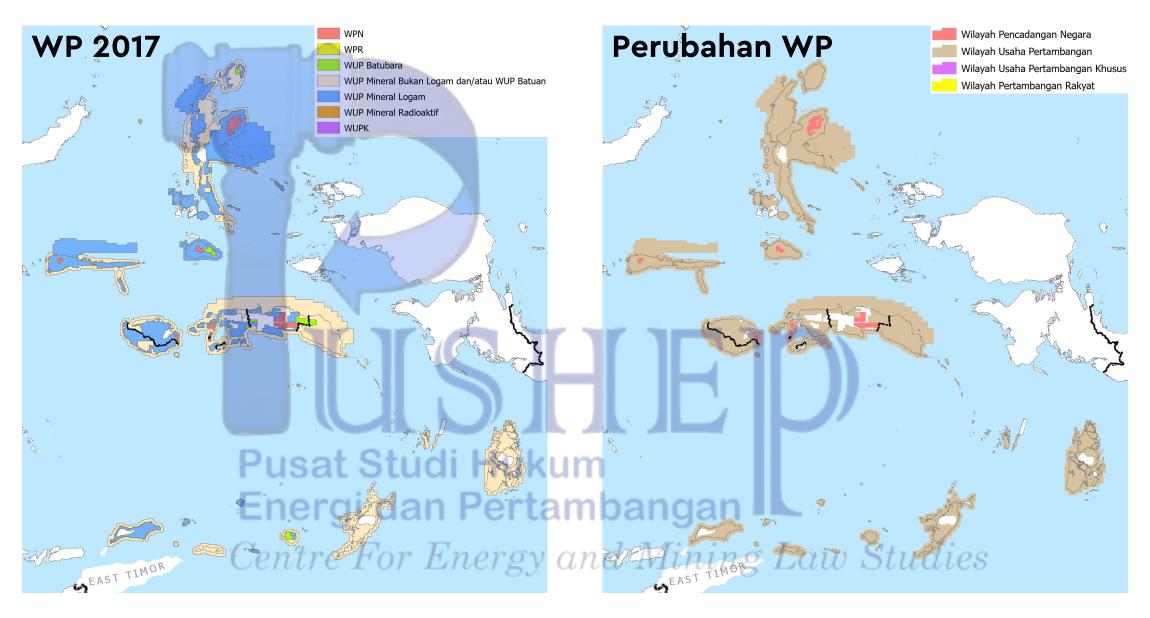
PERUBAHAN WP KEPULAUAN NUSA TENGGARA





PERUBAHAN WP KEPULAUAN MALUKU





PERUBAHAN WP PULAU PAPUA



